

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah. Pengelolaan yang optimal perlu dilakukan agar PNBP dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penerimaan negara. Walaupun jumlahnya tidak sebesar penerimaan dari sektor pajak, namun kontribusinya cukup signifikan untuk membiayai belanja negara. Aspek pendapatan negara pada dasarnya ditopang dengan dua unsur pokok yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh Penerimaan Hibah. Pendapatan negara yang bersumber dari PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Optimalisasi pengelolaan PNBP perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PNBP. Namun dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2015 dan tahun-tahun sebelumnya masih banyak permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PNBP yang menjadi temuan BPK. Diantaranya pada tahun 2011, masih ditemukan PNBP pada 28 K/L sebesar Rp.331,94 miliar dan USD 2,01 juta yang terlambat/belum setor, kurang/belum dipungut dan digunakan langsung diluar mekanisme APBN. Pada tahun 2013 terdapat PNBP pada 30 K/L sebesar Rp.384,98 miliar dan USD 1.000.000 yang terlambat/belum dipungut, berindikasi setoran fiktif dan digunakan langsung diluar mekanisme APBN. Pada tahun 2014 BPK menemukan adanya PNBP pada 44 K/L yang terlambat/belum

disetor sebesar Rp.361,41 miliar, kurang/tidak dipungut sebesar Rp.132,67 miliar, digunakan langsung diluar mekanisme APBN sebesar Rp.304,53 miliar serta belum dikelola dengan tertib sebesar Rp.317,86 miliar dan USD28,24 juta, dan di tahun 2015 temuan BPK terkait pengelolaan PNBPN pada 26 K/L kurang/belum disetor sebesar Rp.163 miliar, PNBPN terlambat setor sebesar Rp.48,8 miliar, PNBPN telah dipungut dan belum disetor Rp.23,74 miliar, pungutan sesuai tarif dan digunakan langsung sebesar Rp.89,32 miliar, pungutan tanpa dasar hukum dan digunakan langsung sebesar Rp.89,78 miliar, permasalahan lainnya sebesar Rp.24,84 miliar.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan PNBPN. Terlebih dengan adanya perkembangan informasi teknologi yang begitu pesat dan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat dan dapat diandalkan (*reliable*), maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 (MPN G-2) yang diluncurkan pada tanggal 27 Februari 2014. Modul ini merupakan aplikasi berbasis *web* bagi pembayaran pajak, cukai, PNBPN, dan non-anggaran, yang dikenal dengan aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN *Online*). Aplikasi SIMPONI merupakan salah satu contoh dari berbagai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan *good governance*.

SIMPONI merupakan sistem yang digunakan untuk menatausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dalam pembayaran/penyetoran PNBPN

dan penerimaan non anggaran yang dikelola oleh DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). SIMPONI sangat membantu pemerintah karena sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi dalam hal pembayaran dan penyetoran, sehingga dapat mengurangi kesalahan penghitungan PNB. Kesalahan dapat diminimalisasi karena aplikasi ini adalah online dan tak menggunakan uang tunai atau *cashless*. Selain itu, sistem *online* membuat pelayanan dapat dilakukan dalam 24 jam tanpa harus tergantung jam kerja. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi wajib bayar untuk membayar PNB dan penerimaan non anggaran melalui berbagai cara pembayaran seperti *teller bank*, ATM maupun *internet banking*. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

Perkembangan dibidang informasi teknologi juga harus dibarengi dengan perubahan regulasi pemerintah yang mengatur penerapannya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Secara Elektronik maka diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara secara elektronik, wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melaksanakan penyetoran penerimaan negara melalui sarana layanan penerimaan negara dalam bentuk layanan pada loket/*teller (over the counter)* dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Penerimaan negara di atas meliputi seluruh penerimaan negara yang disetorkan yang diterima melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan kode *billing* melalui SIMPONI.

Terkait penerapan SIMPONI, maka Kementerian Keuangan melalui suratnya Nomor S-833/MK.02/2014 tanggal 11 Desember 2014 menyampaikan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga perihal penggunaan SIMPONI dalam

pembayaran/penyetoran PNBP menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pencatatan dan pelaporan PNBP, seluruh wajib setor di lingkungan K/L dan wajib bayar yang berada di bawah pembinaan K/L diminta menggunakan SIMPONI dalam melaksanakan pembayaran/penyetoran PNBP. Juga dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-535/MK.02/2015 tanggal 14 Juli 2015 kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga perihal Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2014 menyatakan bahwa sehubungan dengan akan dilakukan penutupan MPN G1 pada akhir tahun 2015, diharapkan agar seluruh K/L melakukan sosialisasi implementasi SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PNBP di internal K/L maupun kepada Wajib Bayar mitra instansi K/L dalam rangka persiapan penutupan MPN G1.

Merujuk pada hal di atas, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang melakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak juga ikut melaksanakan penerapan SIMPONI dalam penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerjanya, yang dimulai pada Januari 2015. Seiring dengan penerapan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI), hal ini merupakan tantangan tersendiri sekaligus langkah yang baik agar dapat mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerapan SIMPONI harus dilakukan secara bertahap dan penting adanya sosialisasi terlebih dahulu, menimbang banyaknya persiapan yang harus dilakukan terkait penerapan sistem PNBP *online*, baik kesiapan dari segi peralatan dan jaringan internet yang memadai, kesiapan sumber tenaga pelaksana dan kesiapan pihak ketiga sebagai wajib bayar.

Penerapan SIMPONI dalam penyetoran PNBPN dengan sistem *billing* yang merupakan sistem yang dipergunakan untuk membantu dalam mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, baik bagi pihak perusahaan agen pelayaran, perusahaan travel umroh/haji terutama dapat mempermudah administrasi dan pengelolaan PNBPN pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. Sehingga dengan kemudahan yang ada memberi dampak positif bagi pendapatan PNBPN yang diperoleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. Hal yang lebih penting dari semua itu adalah bahwa penerapan SIMPONI hendaknya mampu memberikan fleksibilitas yang besar bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara.

Dikutip dari *news.detik.com* bahwa “Pengimplementasian SIMPONI dalam pembayaran/penyetoran PNBPN terbukti sangat membantu Kementerian dan Lembaga dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagaimana diungkapkan oleh RBA Widjonarko, SKM M.Kes, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Priok. Setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh satkernya dengan penerapan SIMPONI. Pertama, SIMPONI telah merubah proses bisnis pembayaran dari uang tunai menjadi *cashless* dengan penyediaan fasilitas EDC yang ditawarkan. Akibatnya, resiko memegang uang tunai (seperti kehilangan atau salah hitung) dapat berkurang sehingga perhitungan menjadi lebih akurat dan akuntabel. Kedua, dengan sistem *online* pelayanan bisa berjalan 24 jam sesuai dengan tuntutan pengguna layanan satkernya. “Dengan SIMPONI perusahaan dapat melakukan pembayaran secara *online* dan menerima pelayanan setiap saat”, ujarnya. Selain

itu, instansi yang dipimpinnya juga tidak lagi direpotkan dengan penatausahaan pembayaran karena data penerimaan sudah tersedia melalui SIMPONI. “Jadi kami tinggal memonitor saja realisasinya”, tambah Widjonarko.”

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa penerapan SIMPONI begitu bermanfaat bagi instansi yang menerapkannya terkait penyetoran PNBPN, sehingga mempermudah pengelolaan PNBPN dan pemberian layanan bagi satuan kerja. Idealnya dengan berbagai kemudahan dan keakuratan yang diperoleh dapat memberi dampak bagi peningkatan kesadaran wajib bayar/wajib setor untuk membayar PNBPN dan juga dalam hal penyelesaian permasalahan yang menjadi temuan BPK RI terkait pengelolaan PNBPN, sehingga turut memberi pengaruh pada jumlah pendapatan PNBPN yang akan diperoleh K/L atau satuan kerja yang menerapkan SIMPONI. Namun apakah berbagai manfaat dan kemudahan yang ada dari penggunaan SIMPONI dapat meningkatkan jumlah pendapatan PNBPN pada suatu satuan kerja masih perlu dilihat lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pendapatan PNBPN pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebelum dan sesudah digunakannya aplikasi SIMPONI dalam pengelolaan PNBPN dengan mengambil judul “ANALISIS PENDAPATAN PNBPN PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PNBPN *ONLINE* (SIMPONI)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perubahan pendapatan PNBP (per jenis layanan) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebelum dan setelah penerapan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI)?”

## 1.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini disusun penulis dengan pembatasan masalah pada pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional untuk tiga tahun sebelum penerapan SIMPONI (tahun 2012 sampai 2014) dan setelah penerapan SIMPONI (tahun 2015 sampai 2017), dengan memperhatikan pendapatan PNBP per jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pendapatan PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebelum dan setelah penerapan aplikasi SIMPONI.

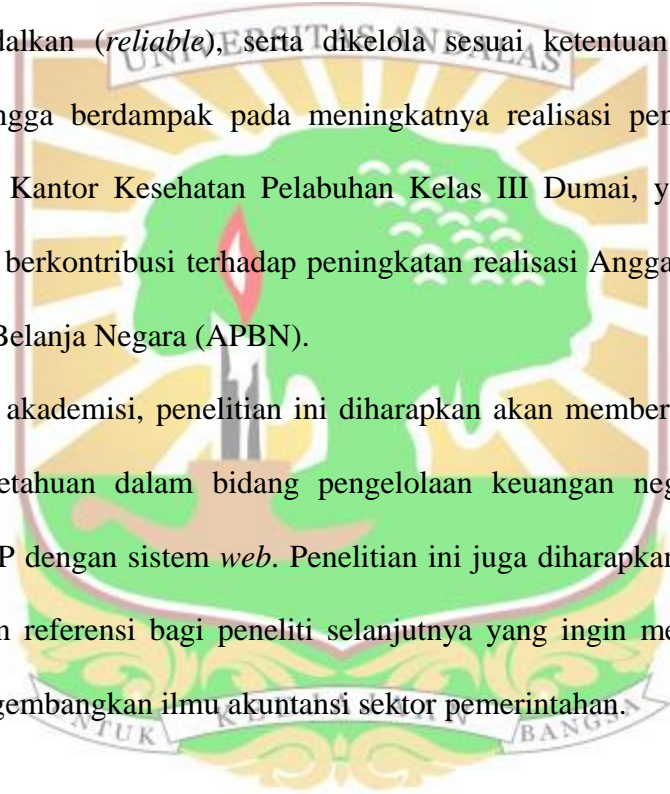
## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan PNBP

yang berbasis Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai

2. Bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengelolaan PNB yang berbasis Sistem Informasi PNB *Online* (SIMPONI), khususnya untuk penyeteroran PNB. Agar dapat meningkatkan pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat akuntabel, transparan dan dapat diandalkan (*reliable*), serta dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga berdampak pada meningkatnya realisasi pendapatan PNB pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai, yang diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan negara khususnya PNB dengan sistem *web*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau pun mengembangkan ilmu akuntansi sektor pemerintahan.





## 1.6 Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun atas lima (V) bab, agar mempunyai susunan yang sistematis. Adapun sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

### BAB I, PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan penelitian sebelumnya.

### BAB III, METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### BAB IV, ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan analisis data dari penelitian yang dilakukan

### BAB V, PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian